



This is an open access article under  
CC-BY-SA license

\* Corresponding Author

# MENGURAI KOMPLEKSITAS STUNTING MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI TINGKAT LOKAL

Setyo Nugroho<sup>1</sup>, Sugiyanto<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Indonesia

Email: \*1hsyahnan@gmail.com

**Abstract.** *Stunting is a multidimensional public policy issue influenced not only by health factors but also by social, economic, cultural, and governance dimensions. The sectoral approach that has traditionally dominated stunting interventions has not been sufficient to address its complex causes at the local level. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in stunting management by emphasizing the synergy among government institutions, communities, the private sector, and non-governmental organizations. A qualitative case study approach was employed to explore collaborative practices in local stunting governance. Data were collected through in-depth interviews, observations, and focus group discussions involving key stakeholders. Data were analyzed using an interactive model consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the effectiveness of stunting management is strongly influenced by the quality of collaboration among stakeholders, particularly the clarity of roles, mutual trust, and effective coordination mechanisms. Collaborative governance enables the integration of cross-sectoral interventions, including health, education, sanitation, and social protection programs, resulting in more comprehensive and context-sensitive policy implementation. Furthermore, active community participation strengthens policy legitimacy and enhances program sustainability. This study concludes that collaborative governance provides an effective governance framework for addressing stunting at the local level. The findings imply the need to strengthen collaborative institutions, enhance the capacity of local actors, and develop adaptive and participatory coordination mechanisms to accelerate sustainable stunting reduction. The study contributes to the literature by highlighting collaborative governance as a strategic approach to managing complex public policy issues in local government.*

**Keyword:** *Stunting; Collaborative Governance, Local Governance, Multi-Stakeholder Collaboration, Public Policy.*

**Abstrak.** *Stunting merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan sektoral yang selama ini diterapkan dinilai belum mampu mengatasi kompleksitas permasalahan stunting secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanganan stunting di tingkat lokal dengan menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan para pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antaraktor yang ditandai dengan kejelasan pembagian peran, terbangunnya kepercayaan, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Pendekatan collaborative governance mampu mengintegrasikan program lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial, sehingga intervensi menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan keberlanjutan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat tata kelola penanganan stunting di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan kolaboratif, peningkatan kapasitas aktor lokal, serta pengembangan mekanisme koordinasi yang adaptif dan partisipatif untuk mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Stunting; Collaborative Governance, Tata Kelola Lokal, Kolaborasi Multi-Aktor, Kebijakan Publik.*



## PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan manusia yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada terhambatnya perkembangan fisik dan kognitif anak (Bank, 2006)(Bank, 2020). Dampak jangka panjang dari stunting tidak hanya berimplikasi pada kualitas kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa di masa depan (UNICEF, 2021).

Di Indonesia, upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah. Namun demikian, prevalensi stunting masih menunjukkan angka yang relatif tinggi di sejumlah daerah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan akses layanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai determinan, seperti kemiskinan, sanitasi, pendidikan, pola asuh, serta tata kelola pemerintahan (Bappenas, 2022).

Pendekatan konvensional yang bersifat sektoral dan top-down dinilai belum mampu secara optimal menjawab kompleksitas permasalahan stunting (Supardal et al., 2024). Program-program intervensi yang berjalan secara parsial seringkali tidak terintegrasi dan kurang mempertimbangkan konteks lokal. Padahal, karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan di tingkat lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan stunting secara komprehensif.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah *collaborative governance*, yaitu suatu model tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat

sipil, dan komunitas lokal dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Dalam konteks stunting, *collaborative governance* memungkinkan integrasi lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, implementasi *collaborative governance* di tingkat lokal memerlukan kapasitas kelembagaan dan sosial yang memadai. Pemerintah desa, sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai pihak dan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tata kelola di tingkat desa tidak hanya membutuhkan kapasitas teknis, tetapi juga kemampuan sosial dalam membangun relasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Namun demikian, praktik *collaborative governance* dalam penanganan stunting di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar sektor, rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi lokal. Hal demikian juga terjadi di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pendekatan kolaboratif dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks lokal yang beragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai kompleksitas permasalahan stunting melalui pendekatan *collaborative governance* di level lokal khususnya di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi tata kelola kolaboratif, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan

stunting dan collaborative governance merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap interaksi antar aktor, dinamika sosial, serta konteks lokal. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan praktik kolaborasi secara lebih komprehensif (Abdillah et al., 2025; Creswell, 2010).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami implementasi collaborative governance dalam penanganan stunting di level lokal. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran kontekstual yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam setting nyata (Robert K. Yin, 2018).

Penelitian dilakukan pada beberapa wilayah di tingkat desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik prevalensi stunting serta variasi praktik kolaborasi antar aktor. Fokus penelitian diarahkan pada: 1) Proses kolaborasi antar aktor dalam penanganan stunting; 2) Peran pemerintah desa dan aktor non-pemerintah; 3) Dinamika interaksi, kepercayaan, dan koordinasi; 4) Kapasitas kelembagaan dalam mendukung aksi kolektif.

Sedangkan untuk penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penanganan stunting. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Aparatur pemerintah desa; 2) Tenaga kesehatan (puskesmas, kader posyandu); 3) Perwakilan organisasi masyarakat; 4) Pendamping program pemerintah; 5) Tokoh masyarakat dan keluarga sasaran.

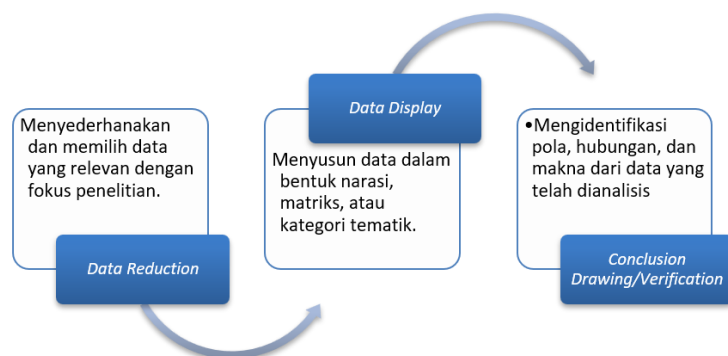
Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014). Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut: a) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik kolaborasi antar aktor dalam penanganan stunting; b) Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD). Dilakukan untuk memperoleh perspektif kolektif serta mengidentifikasi dinamika interaksi antar pemangku kepentingan; c) Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kolaborasi, implementasi program, serta

interaksi sosial di lapangan; d) Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan program, dan data statistik terkait stunting.

Selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data atau yang lebih dikenal dengan triangulasi (Abdillah et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi 3 (tiga) tahap utama: *Pertama*, Reduksi Data (*Data Reduction*). Menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. *Kedua*, Penyajian Data (*Data Display*). Menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, atau kategori tematik. *Ketiga*, Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis.

**Gambar 2. Tahap Analisis Data**



Sumber: Data diolah, 2026.

Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik yang dikaitkan dengan kerangka teori collaborative governance dari Ansell & Gash (Ansell & Gash, 2008) serta Emerson et al (Emerson et al., 2012).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu: a) Triangulasi sumber dan metode; b) Member check (konfirmasi kepada informan); c) Peer debriefing (diskusi dengan rekan peneliti); d) Audit trail (pelacakan proses penelitian secara sistematis).

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Sebagai Tahap akhir dalam penelitian ini, analisis menggunakan sintesis kerangka

collaborative governance dari Ansell & Gash (2008) dan Emerson et al. (2012) sebagai alat analisis, dengan fokus pada: a) Kondisi awal (starting conditions); b) Desain kelembagaan; c) Proses kolaboratif (dialog, trust, komitmen); d) Motivasi bersama (shared motivation); e) Kapasitas aksi kolektif (capacity for joint action); f) Outcome penanganan stunting.

Kerangka ini digunakan untuk mengurai bagaimana kolaborasi antar aktor berlangsung serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam konteks lokal.

## HASIL DAN DISKUSI

### **Kompleksitas Stunting di Tingkat Lokal: Fragmentasi dan Interdependensi Aktor**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa stunting di level lokal tidak dapat direduksi sebagai persoalan kesehatan semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antar determinan struktural dan kultural. Di lapangan, intervensi yang dilakukan oleh sektor kesehatan (puskesmas, posyandu) seringkali berjalan terpisah dari intervensi sektor lain seperti sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial (Fardianti & Bintari, 2024; Herni et al., 2024; Prasongko & Permatasari, 2025; Supardal et al., 2024). Fragmentasi ini menciptakan *policy silos* yang menghambat efektivitas program.

Namun demikian, terdapat indikasi kuat bahwa aktor-aktor lokal sebenarnya berada dalam kondisi interdependensi tinggi. Pemerintah desa membutuhkan data kesehatan dari tenaga medis, sementara tenaga kesehatan membutuhkan dukungan sosial dari kader dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan intervensi. Kondisi ini selaras dengan konsep *starting conditions* dalam model Ansell dan Gash (2008), di mana distribusi sumber daya yang tidak merata justru mendorong kebutuhan akan kolaborasi.

Dalam konteks ini, kompleksitas stunting dapat dipahami sebagai *wicked problem* masalah yang tidak memiliki solusi tunggal dan membutuhkan pendekatan lintas sektor (Alderman & Headey, 2017). Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan karena mampu mengakomodasi interdependensi aktor dan keragaman kepentingan.

### **Desain Kelembagaan: Antara Formalitas dan Praktik Kolaboratif**

Secara formal, struktur kelembagaan penanganan stunting di tingkat lokal telah tersedia, seperti keberadaan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan forum lintas sektor (Rahmawati et al., 2024). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang kolaborasi substantif.

Banyak forum koordinasi yang berlangsung secara simbolik tanpa menghasilkan integrasi program yang nyata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara institutional design dan praktik kolaboratif yang efektif. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan yang efektif seharusnya mampu menciptakan aturan main yang inklusif, transparan, dan mendorong partisipasi aktif seluruh actor (Ansell & Gash, 2008).

Lebih lanjut, pendekatan Emerson et al. (2012) menekankan bahwa kelembagaan tidak hanya soal struktur formal, tetapi juga kapasitas sistem dalam mendukung aksi kolektif. Dalam penelitian ini, kapasitas tersebut masih terbatas, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan integrasi data. Akibatnya, kolaborasi cenderung bersifat prosedural, bukan substantif.

### **Proses Kolaboratif: Trust Deficit dan Dinamika Interaksi**

Salah satu temuan kunci adalah bahwa proses kolaboratif di tingkat lokal masih menghadapi defisit kepercayaan (*trust deficit*) antar aktor. Beberapa aktor non-pemerintah, seperti kader dan masyarakat, merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga partisipasi yang terjadi bersifat instrumental, bukan deliberatif.

Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), trust building merupakan elemen krusial dalam proses kolaboratif. Tanpa kepercayaan, dialog yang terjadi tidak akan menghasilkan komitmen bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa proses face-to-face dialogue memang berlangsung, tetapi belum mencapai tahap shared understanding yang mendalam (Imperial et al., 2011).

Di sisi lain, terdapat praktik-praktik lokal yang menunjukkan potensi kolaborasi yang kuat, terutama ketika terdapat figur pemimpin lokal yang mampu memediasi kepentingan dan membangun komunikasi lintas aktor. Hal ini menguatkan pentingnya *facilitative leadership* dalam mendorong kolaborasi yang efektif.

### Shared Motivation: Legitimasi Sosial sebagai Kunci

Dimensi *shared motivation* dalam kerangka Emerson et al. (2012) menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kolaborasi. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang berhasil umumnya didukung oleh adanya legitimasi sosial yang kuat, terutama ketika masyarakat merasa memiliki program yang dijalankan.

Sebaliknya, program yang bersifat top-down cenderung mengalami resistensi atau partisipasi semu (Chris Huxham, 2003; Liu & Xu, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi bersama tidak dapat dibangun hanya melalui instrumen kebijakan, tetapi membutuhkan proses sosial yang melibatkan interaksi, kepercayaan, dan pengakuan terhadap peran masing-masing aktor.

Temuan ini juga menguatkan bahwa dimensi sosial dalam tata kelola lokal sangat menentukan keberhasilan program, sebagaimana terlihat dalam dinamika pemerintahan desa yang menuntut kemampuan interaksi dan komunikasi sosial.

### Capacity for Joint Action: Keterbatasan dan Potensi Lokal

Kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*) menjadi tantangan utama dalam implementasi *collaborative governance*. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menjadi penghambat *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, yaitu: a) Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran; b) Lemahnya integrasi data antar sektor; c) Kurangnya mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat potensi lokal yang signifikan, seperti keberadaan kader posyandu, jaringan sosial masyarakat, serta struktur pemerintahan desa yang relatif dekat dengan warga (Supardal et al., 2024; Utiya &

Muhammad, 2025). Potensi ini dapat menjadi modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kapasitas kolaboratif apabila dikelola dengan baik.

Dalam perspektif Emerson et al. (2012), kapasitas kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh sumber daya formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam memobilisasi jaringan dan pengetahuan lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan institusional.

### Outcome Kolaborasi: Antara Proses dan Dampak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam penanganan stunting tidak hanya diukur dari penurunan angka prevalensi, tetapi juga dari kualitas proses kolaborasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, peningkatan koordinasi dan partisipasi telah menghasilkan intervensi yang lebih kontekstual dan adaptif.

Namun demikian, dampak jangka panjang masih bergantung pada keberlanjutan kolaborasi. Tanpa institusionalisasi yang kuat, kolaborasi cenderung bersifat temporer dan bergantung pada individu tertentu, terutama pemimpin lokal khususnya Camat sebagai koordinator.

Hal ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* bukan sekadar alat kebijakan, tetapi merupakan proses transformasi tata kelola yang membutuhkan waktu, komitmen, dan adaptasi berkelanjutan.

**Table 3.1. Outcome Kolaborasi: Antara Proses dan Dampak dalam Penanganan Stunting di Kecamatan Kertek**

Dimensi Outcome	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Tata Kelola	Implikasi Kebijakan
<b>Peningkatan Koordinasi</b>	Forum koordinasi lintas sektor, rembuk stunting, dan pertemuan rutin memperkuat komunikasi antaraktor.	Meningkatkan sinkronisasi program dan mengurangi tumpang tindih kewenangan.	Memperkuat mekanisme koordinasi formal yang berkelanjutan di tingkat kecamatan dan desa.
<b>Peningkatan Partisipasi</b>	Keterlibatan pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu,	Program lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan	Mendorong partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan,

	PKK, TPK, dan masyarakat semakin meningkat.	legitimasi kebijakan.	pelaksanaan, dan evaluasi program.
<b>Kepercayaan Antaraktor</b>	Terbangun melalui komunikasi intensif, transparansi informasi, dan pengalaman bekerja sama.	Memperkuat modal sosial dan memperlancar implementasi kebijakan lintas sektor.	Mengembangkan budaya kolaboratif berbasis transparansi, akuntabilitas, dan saling percaya.
<b>Integrasi Program</b>	Program kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial mulai disinergikan dalam intervensi stunting.	Menghasilkan intervensi yang lebih komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik lokal.	Mengembangkan kebijakan konvergensi lintas sektor dengan dukungan sistem informasi terpadu.
<b>Kapasitas Kolektif</b>	Kolaborasi meningkatkan kemampuan aktor dalam berbagi sumber daya, informasi, dan penyelesaian masalah bersama.	Memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan lokal dalam menghadapi persoalan kompleks.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aktor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
<b>Keberlanjutan Kolaborasi</b>	Kolaborasi masih dipengaruhi oleh kepemimpinan Camat dan komitmen individu sehingga belum sepenuhnya terinstitusionalisasi.	Berpotensi menurunkan efektivitas apabila terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan.	Menginstitusionalisasikan forum kolaborasi melalui regulasi, SOP, dan penguatan kelembagaan agar tidak bergantung pada individu.

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) serta Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Ansell & Gash (2008) dan Emerson et al. (2012) saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika kolaborasi. Model Ansell & Gash memberikan kerangka prosedural, sementara Emerson et al. memperkaya analisis dengan dimensi sistemik dan kapasitas.

Dalam konteks stunting di level lokal, kedua pendekatan tersebut mengungkap bahwa: a) Kolaborasi dalam penanganan stunting di Kecamatan Kertek dipicu oleh interdependensi antar aktor; b) Keberhasilan ditentukan oleh kualitas interaksi dan kepercayaan; c) Kapasitas kolektif menjadi faktor kunci keberlanjutan; d) Dimensi sosial dan lokalitas memiliki peran strategis

Dengan demikian, collaborative governance bukan hanya pendekatan normatif, tetapi merupakan kebutuhan empiris dalam menghadapi kompleksitas stunting di tingkat lokal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa stunting di level lokal merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral dan teknokratis semata. Stunting berakar pada interaksi multidimensional antara faktor mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan tata kelola, sehingga membutuhkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. Dalam konteks ini, collaborative governance terbukti menjadi kerangka yang relevan untuk mengurai dan menangani kompleksitas tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor di tingkat lokal telah terbentuk secara formal, namun belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Fragmentasi program, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi kendala utama dalam implementasi kolaborasi. Selain itu, defisit kepercayaan antar aktor dan dominasi pendekatan top-down turut menghambat terbentuknya shared understanding dan komitmen bersama.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh kualitas interaksi sosial, kepemimpinan fasilitatif, serta legitimasi yang dibangun melalui partisipasi masyarakat. Dimensi shared motivation dan capacity for joint action menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan kolaborasi. Potensi lokal, seperti modal sosial masyarakat dan kedekatan pemerintah desa dengan warga, merupakan aset

strategis yang dapat dioptimalkan dalam kerangka *collaborative governance*.

Secara teoretis, penelitian ini menguatkan dan mensintesis model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) serta Emerson et al. (2012). Model tersebut terbukti mampu menjelaskan dinamika kolaborasi dalam konteks lokal, baik dari sisi proses, motivasi, maupun kapasitas kolektif. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial dan konteks lokal yang melingkupinya.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan tata kelola kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan, peningkatan kapasitas aktor lokal, serta integrasi lintas sektor yang lebih adaptif. Dengan demikian, *collaborative governance* dapat menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A. F., Pujiyati, W., & Muhammad, A. S. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Saba Jaya Publisher.

<https://box.apmd.ac.id/drive/d/s/14pnL4G>

Alderman, H., & Headey, D. D. (2017). How Important is Parental Education for Child Nutrition? *World Development*, 94, 448–464.

<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.007>

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Bank, W. (2006). *Repositioning Nutrition as Central to Development, a Strategy for Large-Scale Action*. The World Bank.

Bank, W. (2020). *Levels and Trends in Child Malnutrition*.

Bappenas. (2022). *Strategi nasional percepatan penurunan stunting 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Chris Huxham. (2003). Theorizing Collaboration Practice. *Public Management Review*, 5(3), 401–424.

<https://doi.org/10.1080/1471903032000146964>

Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research ...*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Fardianti, P., & Bintari, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting. *Jurnal Governansi*, 10, 201–212.

Herni, H., Tahir, N., & Arfah, S. R. (2024). Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(April).

Imperial, M. T., Bangun, R., Mata, P., Publik, M. P., Nurmandi, A., Osborne, D., Isaiah, O., Wayne, K., Authors, F., Ii, B. A. B., The Republic of Indonesia, Lyu, H., Kukmin, W., Madang, C., Hubungan, A., Negara, U. D., Indonesia, R., Nomor, U., Daerah, P., ... View, U. M. Y. (2011). Scientists' collaboration strategies: implications for scientific and technical human capital. *Jurnal Analisis*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Liu, L., & Xu, Z. (2018). Collaborative governance: A potential approach to

preventing violent demolition in China. *Cities*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.019>

Prasongko, G., & Permatasari, A. (2025). Penanggulangan Stunting Melalui Collaborative Governance di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 51(1), 30–43.

Rahmawati, S. A., Djumiarti, T., & Triyuningsih. (2024). Proses Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalansi Stunting di Kabupaten Purworejo. *Journal of Management & Public Policy*, 13(3), 1–17.

Robert K. Yin. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods* (6th ed). SAGE Publications, Inc.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Supardal, S., Muhammad, A. S., Sugiyanto, S., & Trihidayat, T. (2024). State instrumentalization village: A study on the implementation of the stunting program in Ngargosari village. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 8824. <https://doi.org/10.24294/jipd8824>

Utiya, L., & Muhammad, A. S. (2025). *Strategi Kader Penggerak dalam Memaksimalkan Pelayanan Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu*. 4(2), 1156–1171.